

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KELURAHAN
KASSI – KASSI KECAMATAN PERWAKILAN
RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**



Oleh

R I D A H
45 96 021 070

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Negara Jurusan Ilmu Administrasi

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2 0 0 1**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tidak sedikit hambatan dan kendala yang ditemui dalam penyelesaian skripsi ini, namun berkat bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak utamanya bimbingan dari Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, akhirnya hambatan tersebut dapat teratasi, sehingga terwujudlah karya yang sederhana ini.

Olehnya itu melalui kesempatan ini penulis tak lupa menyampaikan terima kasih, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas segala bantuan terutama yang terhormat:

1. Bapak DR. Andi Jaya Sose, SE. MBA, selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. Bapak Drs. Husain Hamka, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45.
3. Bapak Drs. Marten D. Palobo, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Makassar.
4. Ibu Dra. Juharni, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Pembangunan Desa	13
B. Pengertian Otonomi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan	15
C. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	17
D. Pengertian Lurah dan Kelurahan	30
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A. Sejarah Berdirinya Kelurahan Kassi- Kassi	33
B. Letak Geografis	33
C. Keadaan Geografis	34
D. Struktur Organisasi	34

BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
	A. Fungsi BPD Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	39
	B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan	52
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	24

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Teks	Halaman
01.	Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini	43
02.	Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Uang Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Kassi Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini	46
03.	Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kassi-Kassi	47
04.	Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Masyarakat Berpartisipasi Dalam Pembangunan Kelurahan Kassi-Kassi	50
05.	Tanggapan Responden Tentang Koordinasi Antara Pengurus BPD dengan Aparat Kelurahan Kassi-Kassi	54
06.	Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Administrasi BPD Kelurahan Kassi-Kassi ...	56
07.	Tanggapan Responden Tentang Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Kassi-Kassi Dalam Ikut Serta Berpartisipasi Dalam Pembangunan	58



BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup suatu bangsa, maka harus menyelenggarakan suatu kegiatan pembangunan. Dengan pelaksanaan pembangunan kebutuhan hidup masyarakat desa, baik dalam wujud fisik material maupun bersifat moril spritual. Hal ini disebabkan karena pembangunan pada pokoknya adalah perusahaan yang harus terus menerus ke arah perbaikan taraf hidup masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional sekarang ini, pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting, karena sebagian besar masyarakat Indonesia yang berada di pedesaan masih hidup dalam belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan dasar ini, maka kegiatan pembangunan desa merupakan sasaran pokok dari Pembangunan Nasional dalam rangka usaha mewujudkan trilogy pembangunan bangsa, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Hubungannya dengan itu, maka dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1998-2003 telah digariskan bahwa :

Pembangunan desa yang mengutamakan pembangunan masyarakat pedesaan terus didorong melalui peningkatan keterpaduan pembangunan wilayah, khususnya antar kawasan dan antar perkotaan dan pedesaan dan keterpaduan pembangunan sektoral, peningkatan investasi perkotaan, pengembangan sumber daya manusia perdesaan, pengembangan kelembagaan dan penguasaan teknologi serta pembangunan pemanfaatan sumber daya alam, dan peningkatan iklim yang mempercepat proses transformasi sosial ekonomi dan budaya masyarakat perdesaan. Kemampuan masyarakat perdesaan dalam berproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan, perluasan serta diversifikasi usaha perdesaan guna meningkatkan kapasitas, kemampuan, pendapatan dan taraf hidup masyarakat perdesaan. Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian. Termasuk koperasi dan lembaga keuangan, terus ditingkatkan agar mampu berperan aktif dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan makin meningkatkan kemandirian masyarakat perdesaan dalam pembangunan.

Relevansinya dengan penggarisan di atas, maka berbagai penekanan yang ditegaskan tersebut nampak yang paling prinsipil dalam usaha pembangunan pedesaan dan kelurahan adalah penekanan dalam hal pengembangan dan penataan kelembagaan. Salah satu kelembagaan di pedesaan dan kelurahan yang paling berperan penting dalam usaha pembangunan pedesaan atau kelurahan adalah BPD (Badan Perwakilan Desa).

Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah merupakan lembaga kemasyarakatan yang bersifat lokal yang secara geografis

alasan pokok dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan kelurahan di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Kota Makassar.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Dengan pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar sangat luas, maka perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu dengan membatasi hanya 1 fungsi, yaitu fungsi BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Kelurahan.

Dengan demikian masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan perwakilan Rappocini Kota Makassar.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah kelurahan dalam melaksanakan pembangunan desa.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan perbandingan dengan daerah-daerah lain.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pustaka dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Konseptual

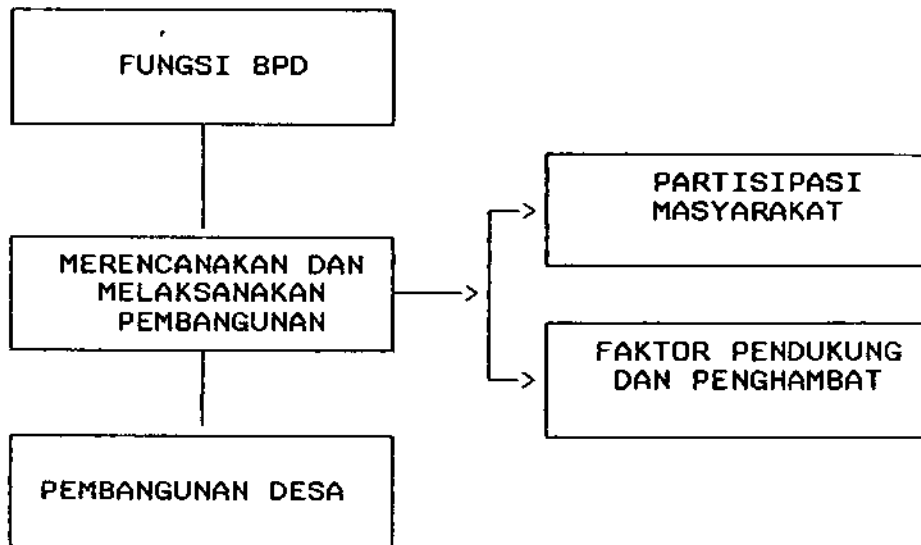
Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk dida-

Keberadaan Badan Perwailan Desa (BPD) adalah diharapkan untuk memacu pelaksanaan pembangunan di wilayah pedesaan, yang dalam menjalankan tugas-tugasnya didukung oleh partisipasi aktif masyarakat desa itu sendiri.

Selanjutnya yang dimaksud dengan partisipasi itu sendiri menurut Mubyarto (1985:16), adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri.

Bila dikaitkan pengertian partisipasi dengan masyarakat, maka terbentuklah pengertian partisipasi masyarakat Masyarakat dalam hal partisipasi tersebut tidak lepas dari sifat kebersamaan, kegotongroyongan satu sama lain. Kesadaran dan tanggung jawab mereka serta kemampuan dituntut dalam kebersamaan itu.

Sehubungan dengan uraian dan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan masalah pokok yang hendak dikaji, maka dapatlah digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut :



E. Metodologi Penelitian

1. Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu cara untuk memberikan gambaran mengenai fungsi BPD, dalam hal ini fungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar dan dasar penelitian adalah untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai ciri-ciri yang akan diteliti.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua penduduk Kelurahan Kassi-Kassi sebanyak 14.074 jiwa orang.

b. Sampel

Sampel adalah bahagian dari sebuah populasi. Adapun sampel penelitian ini dipilih dari masing-masing kelompok masyarakat secara purposive sampling atau secara sengaja yang relevan atau setidaknya mengetahui langsung masalah pengelolaan fungsi BPD, masing-masing terdiri dari:

- Perangkat Desa = 6 orang
- Pengurus BPD = 10 orang
- Tokoh Masyarakat = 20 orang

36 orang

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dengan melalui teknik ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Dengan teknik ini dimaksudkan untuk mengadakan wawancara secara langsung terhadap responden dan informan yang dianggap dapat memberikan keterangan-keterangan yang lebih lengkap, serta mampu membahas dengan tuntas tentang permasalahan yang disoroti dalam penelitian.

yang dianggap dapat memberikan keterangan-keterangan yang lebih lengkap, serta mampu membahas dengan tuntas tentang permasalahan yang disoroti dalam penelitian.

c. Kuesioner

Dalam operasional teknik pengumpulan data, dilakukan melalui cara dengan mengedarkan daftar pertanyaan (angket) kepada masing-masing responden.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, akan diklasifikasikan lalu ditabulasi dalam bentuk-bentuk tabel frekuensi agar mudah dianalisa secara kualitatif dengan persentase sederhana.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai isi dari Penulisan skripsi ini, maka secara sistematika diuraikan dalam lima Bab sebagai berikut:

Bab pertama yaitu Pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan Pengertian pembangunan desa, pengertian Pemerintahan desa

Bab Ketiga menguraikan tentang kondisi wilayah yang terdiri dari letak dan luas wilayah, kependudukan, pendidikan dan sarana dan prasarana serta struktur organisasi.

Bab Keempat membahas tentang fungsi BPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, pengaruh partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan faktor pendukung dan penghambat dalam menfungsikan BPD.

Bab Kelima merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembangunan Desa

Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk berbagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mengisi kemerdekaan bangsa, maka perlu melaksanakan kegiatan pembangunan di tingkat desa yang merupakan rangkaian kegiatan nasional.

Prayitno dan Arsyad (1987:15) memberikan pengertian bahwa "pembangunan pedesaan adalah suatu strategi pembangunan yang dirangsang dalam peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial dari kelompok khusus masyarakat, yaitu si miskin di pedesaan".

Melihat pengertian yang dikemukakan di atas, penulis melihat bahwa apa pembangunan yang dimaksud adalah dibatasi hanya pembangunan pada kelompok khusus yaitu hanya si miskin di pedesaan.

Selanjutnya oleh Kuswara (1985:20) memberikan pengertian yang meluas yaitu :

1. Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat yang dalam penyelenggaraannya harus secara menyeluruh dan terkoordinasi.
2. Pembangunan Desa adalah mensyaratkan adanya kewajiban bersama yang seimbang dan serasi antara pemerintah dan masyarakat.
3. Pembangunan Desa adalah multi sektoral dan merupakan perpaduan daripada program-program sektoral, regional dan Inpres dengan kebutuhan esensial masyarakat.
4. Pembangunan Desa adalah merupakan usaha pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan desa baik pedesaan maupun perkotaan.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa sesungguhnya pembangunan desa merupakan suatu rangkaian dalam pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa secara keseluruhan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa pembangunan desa yang mengutamakan pembangunan masyarakat pedesaan terus didorong melalui peningkatan keterpaduan pembangunan wilayah, khususnya antarkawasan dan antar perkotaan dan pedesaan dan keterpaduan pembangunan sektoral, peningkatan investasi pedesaan yang serasi dengan investasi perkotaan, pengembangan sumber daya manusia pedesaan, pengembangan kelembagaan misalnya lembaga BPD.

Pengembangan kelembagaan BPD merupakan salah satu sektor terpenting dalam pembangunan desa secara umum, dimana mampu berperan aktif dalam pengembangan ekonomi

masyarakat pedesaan dan makin meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.

B. Pengertian Otonomi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan

Desa atau pedesaan sejak awal berdirinya sampai kemudian mencapai perkembangan-perkembangannya hanyalah atas kekuatan dan kegiatan para warga desanya. Desa dapat berkembang karena para warganya mengutamakan asas-asas yang mempunyai nilai yang universal.

Hampir diseluruh tanah air tata kehidupan di desa-desa mempunyai persamaan, yaitu dengan asas-asas dimiliki para warga desa dapat menciptakan dan melangsungkan pemerintahannya dengan kemampuan para warga desanya sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap desa di tanah air kita, telah memiliki sifat otonomi dalam arti mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kekuatan atau kemampuan sendiri.

Keadaan pemerintah desa sekarang ini adalah sebagai akibat pewarisan dari undang-undang yang pernah ada, akibatnya desa dan pemerintah desa yang ada sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri, yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang insentif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dan Ketetapan Manajemen Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya. Undang-Undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat huku, adat istiadat dan kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan Ketahanan Nasional.

Identik dengan itu, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 merumuskan bahwa: "Pemerintahan desa adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat".

Selanjutnya A.W. Widjaya (1992:19) memberikan pengertian bahwa :

Otonomi Desa adalah:

- Tumbuh dalam masyarakat
- Diperoleh secara tradisional
- Bersumber dari hukum adat

Jadi desa bersifat otonom yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berbeda dengan kelurahan yang sifatnya sebagai wilayah administratif yaitu menyelenggarakan pemerintahannya, ternyata sifat otonom desa itu masih hidup dan dipertahankan hingga sekarang, segala sesuatunya yang mengenai pemerintahan desa disempurnakan, sumber pendapatan desa itu sendiri, juga

sumbangan-sumbangan dari pemerintah (pusat), dari pemerintah daerah dan sebagian pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa. Jadi setiap tahunnya Kepala Desa menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa melalui musyawarah dan mufakat dengan Lembaga Musyawarah Desa.

Demikian lestarnya sifat otonom dari pemerintah desa itu, menurut penjelasan umum dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa point (4), karena keadaan pemerintahan desa sekarang ini adalah sebagai akibat pewarisan dari undang-undang lama yang pernah ada yang mengatur desa.

C. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan

Pengertian partisipasi sebenarnya berasal dari kata Bahasa Inggris, yaitu "participation" yang berarti mengambil sebahagian secara aktif atau kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri.

Bila dikaitkan pengertian partisipasi dengan masyarakat, maka terbentuklah pengertian partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal berpartisipasi tersebut tidak lepas dari sifat kebersamaan, kegotong-royongan satu

sama lain. Kesadaran dan tanggung jawab mereka serta kemampuan dituntut dalam kebersamaan itu.

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara telah ditentukan bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Selanjutnya di dalam GBHN juga disebut bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana pri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Sejak Pelita III Pemerintah telah bertekad untuk semakin meningkatkan gerak pembangujnan di wilayah pedesaan.. Hal ini mengingat masyarakat Indonesia pada umumnya bertempat tinggal di daerah pedesaan. Sehingga jenis pembangunan baik porgram sketoral, regional dan inpres dipusatkan di daerah pedesaan.

Oleh karena itu, pembangunan desa terlebih dahulu ditujukan pada perubahan kehidupa masyarakat pedesaan yang umumnya masih terbekalang dan bersifat tradisional ke arah kehidupan yang lebih maju dan modern.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa :

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, masyarakat desa ini mempunyai ciri-ciri lain dengan masyarakat lainnya.

Adapun ciri-ciri masyarakat desa menurut Landis (Joseph Riwo Kayo, 1985:212), adalah :

1. Untuk kepentingan statistik, desa merupakan suatu daerah yang berpenduduk kurang dari 2.500.
2. Untuk tujuan analisis psikologi sosial, masyarakat desa mempunyai derajat intimitas dan formalitas yang tinggi. Sedangkan masyarakat kota mempunyai hubungan sosial yang impersonal.
3. Untuk tujuan analisis ekonomi, pertanian merupakan kepentingan masyarakat.

Untuk menampung usaha-usaha dan kegiatan masyarakat desa dalam pembangunan, maka telah dibentuk suatu lembaga yang akan membantu pemerintah desa dari desa swadaya ke desa swakarya menuju desa swasembada. Lembaga itulah yaitu disebut Lembaga Sosial Desa (LSD). LSD ini berfungsi mewadahi dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dalam segala bidang dan bertugas melaksanakan dan menggerakkan kegiatan-kegiatan pembangunan di desa.

Secara terperinci, pemerintah lewat Departemen Dalam Negeri menggariskan fungsi-fungsi Lembaga Sosial Desa

(LSD) sebagaimana yang dikuitp dalam bukunya A.W. Widjaja (1992:5) yaitu :

1. Menjadi sarana komunikasi antar pemerintah dan masyarakat, juga antara anggota-anggota masyarakat sendiri.
2. Menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam rangka menunjang program-program pembangunan pemerintah.
3. Menjadi sarana peningkatan keterampilan masyarakat desa.
4. Menjadi sarana modernisasi dalam rangka mengubah pola pemikiran masyarakat yang masih statis-tradisional menjadi dinamis-rasional.
5. Menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wadah dari semua usaha dan kegiatan masyarakat desa dalam pembangunan, maka BPD berusaha menampung dan melaksanakan aspirasi dan inisiatif masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh instansi-instansi pemerintah.

Adapun bidang tugas LSD meliputi aspek-aspek sosial ekonomi dan budaya dengan priotitas utamanya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sektor sosial meliputi suaha-usaha perikemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana. Sektor ekonomi meliputi prasarana, sarana produksi dan konsumsi serta usaha ekonomi lainnya. Sektor budaya meliputi adat istiadat dan agama, pembangunan mental dan tingkah laku masyarakat.

Karena luasnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 28

tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Badan Perwakilan Desa.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Suart Keputusan Nomor 225 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPD. Kemudian pada tahun 1984 mengeluarkan lagi SK. No. 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perwakilan Desa yang pada hakekatnya merupakan penyesuaian dengan keadaan saja.

Dengan demikian penulis merasa perlu mengetahui batasan pengertian yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo, (1980:2) bahwa :

"Partisipasi adalah suatu kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan atas kesukarelaan. Ia menjadi mobilisasi apabila terdapat kekuatan ekstern yang menggerakkan untuk kegiatan tertentu (mungkin untuk masyarakat itu sendiri) suatu pekerjaan secara gotong royong".

Selanjutnya pengertian Partisipasi yang dikemukakan oleh Keit Devis yang dikutip oleh Santoso Sastropetro, (1980:2) mengatakan bahwa:

"Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan".

Dari kedua pengertian partisipasi tersebut pada dasarnya telah mempunyai persamaan artinya keduanya melihat partisipasi itu adalah suatu kegiatan kemasyarakatan dari keterlibatan seseorang atau masyarakat baik pikiran maupun tenaga terhadap usaha mencapai tujuan. Keterlibatan dimaksud dapat melalui proses pengambilan keputusan dalam rapat/pertemuan, dapat pula dengan jalan menyumbangkan pikirannya pada saat pelaksanaan suatu pekerjaan pembangunan.

Partisipasi dalam kegiatan pembangunan dapat merupakan berbagai proses kegiatan baik yang dilakukan secara individu atau perorangan, maupun secara kolektif atau secara bersama-sama, namun yang menjadi masalah bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat menjadi suatu partisipasi aktif.

Partisipasi aktif dalam masyarakat mengambil bentuk aksi sosial, tentu saja bukan tindakan sepias melainkan dapat berkesinambungan. Oleh karena itu dalam gerakan sosial unsur kesukarelaan merupakan hal yang penting atau dengan lain gerakan sosial merupakan gerakan sukarela.

Berbicara tentang partisipasi berarti memiliki unsur sifat, tujuan dan cara. Sesungguhnya pula berbicara tentang partisipasi masyarakat. Perbedaan dalam mengantisipasi unsur sifat tujuan dan cara partisipasi

menandakan adanya perbedaan pelaksanaan partisipasi. Dalam rangka menggerakkan partisipasi diperlukan suatu pengelompokan/pengklasifikasian jenis partisipasi yaitu:

1. Macam sumbangan yang diberikan oleh masyarakat yang berarti berpartisipasi.
2. Wadah partisipasi
3. Menciptakan Prasyarat Partisipasi.

Macam sumbangan yang diberikan meliputi partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda dan partisipasi keterampilan/jasa. Yang kesemuanya ini merupakan macam sumbangan yang diberikan masyarakat sebagai turut sertanya dalam kegiatan dalam pembangunan.

Wadah partisipasi, jenis kedua ini perlu diadakan agar kegairahan partisipasi tidak mengambang, mungkin yang ingin berpartisipasi tetapi tidak mengetahui wadah yang dapat menyalurkan sehingga potensi partisipasi tidak efektif. Maka kegiatan pembangunan tidak banyak membawa hasil. Adapun wadah partisipasi tersebut seperti BPD dan lembaga sosial lainnya. Lembaga-lembaga tersebut adalah wadah yang efektif bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang menjadi masalah sejauh mana langka-langkah tersebut dapat berfungsi sebagai mana mestinya.

Prasyarat partisipasi, diantara usaha menggerakkan partisipasi sebagai mana diuraikan sebelumnya maka diperlukan adanya upaya untuk menciptakan suatu prasyarat partisipasi yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga sosial.

Menurut Drs.I.L. Pasaribu mengemukakan bahwa dalam diri anggota masyarakat terdapat:

- a. Rasa senasib sepenanggungan, ketergantungan
- b. Keterikatan tujuan hidup
- c. Kemahiran menyesuaikan diri
- d. Iklim partisipasi, " (1982:2)

Apa yang telah diuraikan di atas adalah merupakan suatu potensi yang ada dalam diri masyarakat. Oleh karena itu, apabila dalam suatu masyarakat dapat dibutuhkan dan dikembangkan maka akan tercipta partisipasi yang pada gilirannya atas kesadaran sendiri akan tumbuh partisipasi masyarakat yang lebih dapat diarahkan pada kegiatan-kegiatan pembangunan. Tentu saja yang memegang peranan dalam hal ini adalah tokoh-tokoh masyarakat sebagai pemimpin yang akan menggerakkan masyarakat sebagai pemimpin yang akan menggerakkan masyarakat melalui kepemimpinannya.

Lebih lanjut I.L. Pasaribu dan B. Simanjuntak dalam bukunya Sosiologi Pembangunan, (1982:2) menyebutkan bahwa:

"bentuk partisipasi masyarakat adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, harta benda dan partisipasi keterampilan/jasa."

Dengan melalui bentuk partisipasi inilah masyarakat turut mengambil bagian atau turut sertanya masyarakat baik secara individu atau perorangan proses kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Berbagai sumber mengemukakan pemikiran bahwa pembangunan masyarakat desa/kelurahan diarahkan pada perbaikan kondisi hidup masyarakat itu serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Dengan demikian Partisipasi masyarakat dalam menerima dan memelihara hasil-hasil pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat ikutsertaan berpartisipasi bertanggung jawab dalam memelihara hasil pembangunan tersebut.

Tentang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu terdapat beberapa bentuk atau tahapan yaitu:

1. Partisipasi dalam bentuk kontak dengan pihak lain sebagai titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan dan menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya.

3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perasaan terlihat di dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sendiri sedini mungkin di dalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga Partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk politik yang menyangkut nasib mereka.
4. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
5. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka perbaikan kondisi hidup masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menggerakkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Usaha itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berfungsi mendorong motivasi terhadap masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki secara berlanjut.

Dari uraian di atas masyarakat digerakkan melalui:

- a. Proyek pembangunan yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola masyarakat.

- b. Organisasi dan lembaga yang mampu menggerakkan kemasyarakatan dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara terpadu.

Berdasarkan sumber mengemukakan pemikiran bahan pembangunan masyarakat desa/kelurahan diarahkan pada perbaikan kondisi hidup masyarakat. Pembangunan masyarakat desa sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. Dikatakan bahwa penggerakan Partisipasi masyarakat merupakan salah satu sasaran pembangunan itu sendiri. Partisipasi merupakan pengambilan bagian bersama. Partisipasi dapat juga diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Di samping itu Partisipasi dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa/kelurahan atau bukan. Jika masyarakat desa/kelurahan yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek pembangunan desa/kelurahan. Tentang partisipasi masyarakat desa/kelurahan di dalam pembangunan desanya/daerahnya, maka didalamnya terdapat beberapa Partisipasi masyarakat yang dapat dikatakan sekumpulan individu-individu yang dapat hidup secara bersama-sama yang

dipersatukan oleh adanya hasrat untuk membentuk kelompok dalam hal ini yang disebut dengan masyarakat.

Dengan bertitik tolak dari kedua pengertian tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan sekelompok individu-individu (masyarakat) yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri memenuhi kebutuhannya, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun untuk kebutuhan jangka panjang.

Menurut Prof. Soedjito Sostrodiharjo, SH, MA, mengemukakan bahwa:

"Agar suatu pembangunan memperoleh sukses dan lancar maka momentum yang timbul dari gerak pertama digunakan untuk menggerakkan usaha yang lain. Disamping itu maka dalam pembangunan kita harus bekerja secara bertahap. Kita mulai dengan hal-hal yang sudah dikenal di daerah itu kemudian meningkatkan kepada hal-hal yang modern setelah usaha pertama mencapai sukses. Usaha faktor ini, usaha-usaha apa yang dapat diperkirakan mencapai hasil yang cepat dan dapat diusahakan manfaatnya."

Selanjutnya penulis mengetengahkan pendapat salah seorang pakar mengenai definisi pembangunan yaitu, menurut Prof. Dr.S.P. Siagian, MPA, bahwa:

"Pembangunan adalah suatu usaha rangkaian pertumbuhan pembangunan yang berencana sadar oleh modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa".

Apabila definisi tersebut di atas dianalisa lebih lanjut maka akan terlihat beberapa pengertian pokok yang

sangat penting yaitu antara lain:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang berarti dalam suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan.
- b. Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan.
- c. Pembangunan itu ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa.
- d. Pembangunan dilaksanakan secara berencana dan berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.

Dari beberapa batasan dan pengertian pembangunan yang dikemukakan di atas maka ada beberapa hal yang mendapat dan penekanan antara lain seperti:

- a. Pembangunan itu adalah merupakan suatu proses yang terus menerus dan dilaksanakan secara bertahap.
- b. Dalam rangka mencapai pembangunan yaitu peningkatan taraf hidup rakyat maka pembangunan kegiatan awal di mulai dengan pengembangan bidang tanpa melupakan usaha dan kegiatan pembangunan dibidang lainnya.
- c. Dalam rangka pedoman ini maka instansi/lembaga kemasyarakatan seperti gotong royong, permufakatan dan permusyawaratan dan sebaliknya yang hidup di dalam masyarakat yang ebrsiaft positif harus dikembangkan bagi pembangunan dan untuk kehidupan nasional pada umumnya.
- d. Yang penting pula dalam kegiatan pembangunan adalah

melibatkan Partisipasi dari seluruh rakyat.

Setelah dikemukakan beberapa pengertian dasar tentang pembangunan maka pembahasan berikut ini lebih menitik beratkan pada pembahasan mengenai pembangunan masyarakat desa serta kelurahan.

D. Pengertian Lurah dan Kelurahan

Untuk membedakan pengertian di atas, maka dalam uraian ini, akan dibahas secara terpisah sebagai berikut:

1. Lurah, apabila didasarkan pada tugasnya yang dibebankan pada lurah, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Lurah ialah seseorang yang diserahi tugas memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan pada suatu wilayah tertentu.

Rumusan yang penulis kemukakan di atas, adalah sejalan dengan pengertian kepala kelurahan yang telah disebutkan pada pembahasan bagian awal dari materi Skripsi ini, selanjutnya menurut C.S.T Kansil memberikan batasan pengertian tentang Lurah sebagai berikut:

"Lurah adalah penyelenggaraan dan penanggung jawab dibidang Pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka urusan penyelenggaraan Pemerintah daerah, urusan Pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku." (C.S.T. Kansil, 1985:9)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Kelurahan Kassi-Kassi

Disebutkan bahwa kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar sebelum terbentuknya di mekarkan sebagai Kelurahan Persiapan kemudian menjadi kelurahan definitif yang induknya adalah Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini terbentuk sebagai kelurahan persiapan pada bulan Nopember 1992 kemudian menjadi kelurahan definitif atas dasar keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 60/II/95 tanggal 20 Pebruari tahun 1995.

B. Letak Geografis

Secara administratif luas wilayah Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar mempunyai luas wilayah 8.380 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan dengan Kelurahan Borong
- Bagian Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mapala
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bonto Makkio

yang telah ditetapkan.

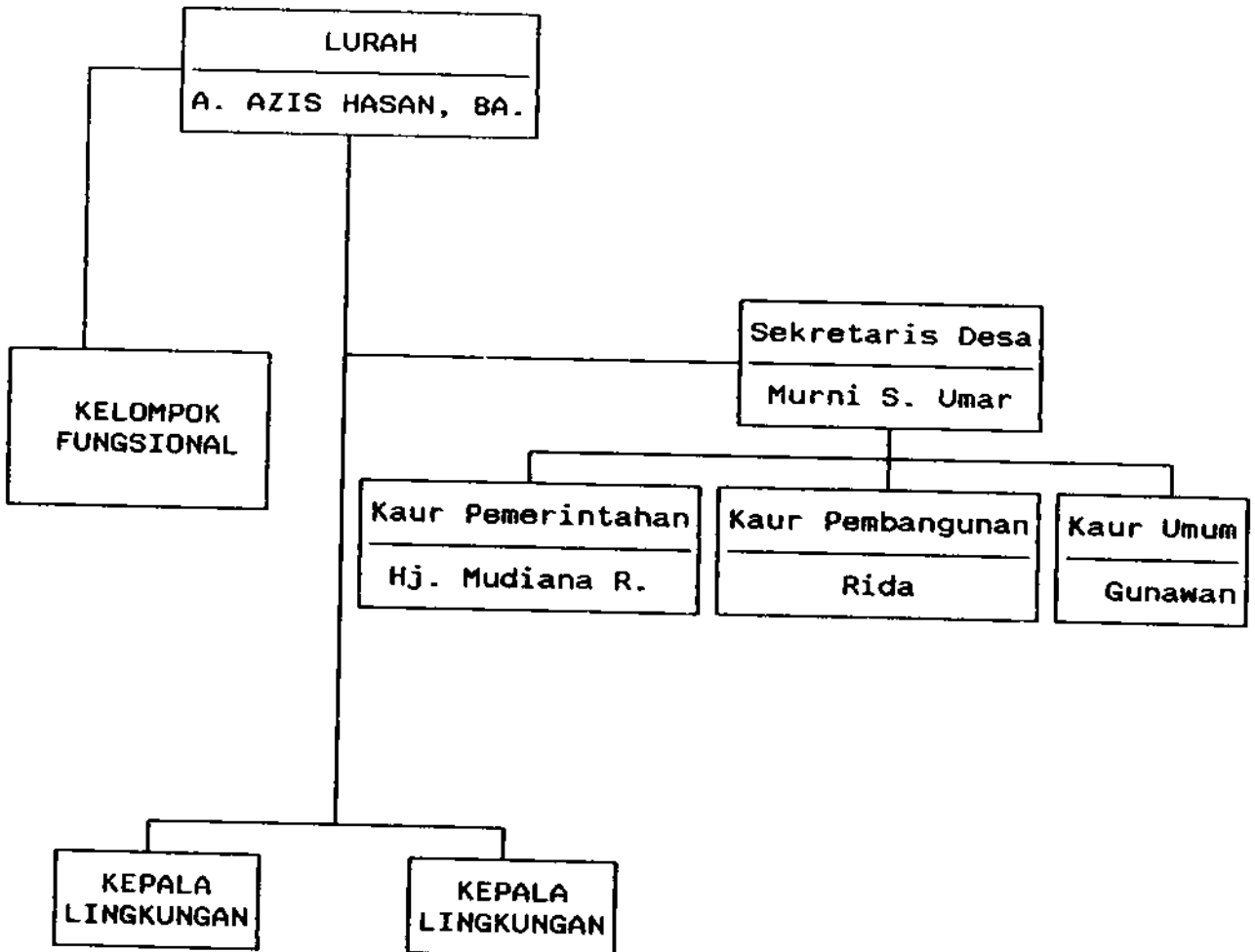
Selanjutnya kita melihat bagaimana struktur organisasi pada Kantor Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar yang tersusun sebagai berikut:

1. Kepala Kelurahan
2. Sekretaris Lurah
 - a. Kaur pemerintahan
 - b. Kaur Pembangunan
 - c. Kaur Umum
 - d. Kelompok Fungsional
3. Badan Perwakilan Desa (BPD)
4. LMD
5. Karang Taruna

Lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa struktur organisasi merupakan cerminan untuk mengetahui kedudukan dari tiap-tiap bagian yang ada dalam kantor, dimana satu bagian dengan bagian yang lainnya saling berhubungan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema struktur organisasi kantor Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KASSI-KASSI KECAMATAN PERWAKILAN
RAPPOCINI KOTA MAKASSAR



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) Sebagai Madah Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kelurahan yang telah ditetapkan, maka perlu ada kesesuaian gerak kegiatan pelaksanaan dengan persiapan dan perencanaan, sebab di dalam perencanaan pembangunan harus didukung oleh Partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang matang dan persiapan pelaksanaan yang mantap. Oleh sebab itu, pada hakekatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan itu harus lebih banyak memadukan, menelusuri, mengarahkan dan melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi pelaksanaan pembangunan kelurahan bukan menciptakan kegiatan baru melainkan apa yang telah direncanakan.

Pembangunan akan memperoleh hasil yang maksimal ada kesinambungan, keserasian dan ketetapan penggunaan bahan waktu, tenaga, tujuan dan cara melakukannya. Disamping itu yang paling menentukan adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan di Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Perwakilan

Rapocini adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan suatu pembangunan kelurahan maka perlu adanya partisipasi masyarakat dalam merencanakan program yang dapat menjamin kelangsungan pembangunan itu. Dalam hal ini perlu kita perhatikan adalah setiap penyusunan suatu program pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan. Sebab salah satu kunci keberhasilan pembangunan kelurahan adalah keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi penyusunan perencanaan pembangunan untuk dilaksanakan. Sehingga penyusunan perencanaan pembangunan itu mampu melihat kedepan dan sanggup menopang berbagai segi pembangunan.

Di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rapocini Makassar selalu mengadakan pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat setiap akhir tahun dan ataus ewaktu-waktu diadakan pertemuan apabila ada sesuatu proyek yang akan dilaksanakan secara mendesak, misalnya perbaikan jalan, pemugaran pagar, pembuatan saluran air dan lain-lain maka Kepala Kelurahan selalu mengundang masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan tersebut.

Karena itu berbicara mengenai perencanaan pembangunan kelurahan maka perencanaan pembangunan kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar

dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Perencanaan dari Atas (Tip Down of Planning)

Dalam hal ini perencanaan pembangunan di atas yaitu baik perencanaan pembangunan dari tingkat pusat, maupun perencanaan pembangunan dari tingkat I dan dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten. Untuk itu Kelurahan terlebih dahulu harus dapat mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang dibuat dari atas, agar diharapkan sejalan dengan perencanaan yang dibuatnya.

2. Perencanaan dari Bawah (Botton Up Planning)

Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Perwakilan Rapoocini kota Makassar dalam menyusun perencanaan pembangunan, diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan pada masing-masing lingkungan RT dan RW yang ada dalam wilayahnya. Dalam penyusunan rencana pembangunan desa/kelurahan tersebut partisipasi masyarakat sangat diharapkan, yaitu dapat memberikan data atau informasi yang diperlukan dalam menyusun rencana kepada pihak pembuat rencana pembangunan, seperti Kader Pembangunan Desa (KPD) atau anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) setempat.

Data-data yang diperoleh dari masyarakat adalah merupakan masukan atau bahan dalam membuat perencanaan pada tingkat desa/kelurahan melalui musyawarah BPD.

hasil musyawarah tersebut merupakan putusan desa/kelurahan yang sekaligus menjadi rencana program pembuatan desa/kelurahan, yang kemudian dilanjutkan pada tingkat Kecamatan.

Di tingkat Kecamatan seluruh perencanaan pembangunan dari masing-masing desa/kelurahan dipadukan melalui unit kerja Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Kemudian diadakan musyawarah dan hasil musyawarah ini akan menjadi rencana program kecamatan yang kemudian dilanjutkan ke tingkat Kabupaten. Pada tingkat Kabupaten ini seluruh rencana pembangunan, baik yang berasal dari atas maupun berasal dari bawah dipadukan melalui Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten.

Bila dilihat dari proses perencanaan pembangunan Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Makassar tersebut nampak bahwa keikutsertaan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini, sebab pada awalnya perencanaan itu adalah berasal dari masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan perencanaan pembangunan desa/kelurahan. Pada Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan.

Dengan demikian untuk dapat mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar dapat digambarkan melalui hasil penelitian tanggapan responden pada tabel sebagai berikut:

TABEL 1

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIKELURAHAN KASSI-KASSI KECAMATAN PERWAKILAN RAPPOCINI

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Aktif	6	16,66
2.	Aktif	10	27,77
3.	Cukup Aktif	14	38,88
4.	Tidak Aktif	6	16,66
	Jumlah	36	100,00

Sumber Data: Hasil Pengolahan Kuesioner, tahun 2001.

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini adalah cukup aktif. Hal ini dapat dilihat dengan adanya responden yang mengatakan sangat aktif yakni 6 orang responden

atau 16,66%, selanjutnya yang mengatakan aktif ada 10 orang responden 27,77%, yang mengatakan cukup aktif 14 orang responden atau 38,88% dan yang mengatakan tidak aktif yakni 6 orang responden atau 16,66%. Dengan demikian jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar adalah berjalan cukup aktif.

Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Kelurahan yang telah ditetapkan maka perlu ada kesesuaian gerak kegiatan pelaksanaan dengan persiapan dan perencanaan. Sebab di dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan harus didukung oleh perencanaan yang matang dan persiapan pelaksanaan yang mantap. Oleh sebab itu fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang handal dalam merencanakan kegiatan pembangunan dewasa ini.

Pelaksanaan pembangunan akan memperoleh hasil yang maksimal ada kesinambungan, keserasian dan ketetapan penggunaan bahan, waktu, tenaga, tujuan dan cara melakukannya. Disamping itu yang paling menentukan adalah partisipasi penuh dari masyarakat yang melalui

Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut maka pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar, Kepala Kantor Pembangunan Desa bertanggung jawab atas mekanisme pelaksanaannya. Dalam hal ini memadukan pelaksanaan pembangunan regional dengan pembangunan sektoral yang ada di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini tersebut.

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan di Kelurahan Kassi-kassi adalah partisipasi penuh dari masyarakat. Hal ini terbukti bahwa Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar telah mendapat penghargaan dari Kecamatan Perwakilan Rappocini atas keberhasilannya dalam pembangunan daerahnya dari berbagai partisipasi masyarakat sendiri.

Adapun bentuk-bentuk masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini pada umumnya partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran, tenaga, uang dan bahan. Tetapi namun demikian untuk dapat lebih mengetahui dengan jelas dari bentuk-bentuk partisipasi masyarakat

tersebut digambarkan seperti pada tabel berikut ini:

TABEL 2

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BENTUK UANG TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DIKELURAHAN KASSI-KASSI
KECAMATAN PERWAKILAN RAPPOCINI

No.	Tahun Anggaran	bantuan Partisipasi (Uang)
1.	1995/1996	Rp. 1.250.000
2.	1996/1997	Rp. 1.200.000
3.	1997/1998	Rp. 1.350.000
4.	1998/1999	Rp. 1.500.000
	Jumlah	Rp. 5.300.000

Sumber Data: Kantor Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini, Tahun 2001.

Berdasarkan data pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk uang terhadap pelaksanaan pembangunan di Kelurahan dalam tahun anggaran 1995/1996 - 1998/1999 sebesar Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus rupiah). Dalam tahun anggaran 1995/1996 bantuan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 1.250.000,- selanjutnya tahun anggaran 1996/1997 bantuan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 1.200.000, serta bantuan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 1.350.000,- dan pada tahun anggaran 1998/1999 bantuan partisipasi masyarakat dalam bentuk

uang sebanyak Rp. 1.500.000.-

Dengan demikian dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kelurahan di Kelurahan Kassi-Kassi Perwakilan Rappocini tidak menutup kemungkinan ada masyarakat yang memberikan partisipasi atau bantuannya lebih dari satu macam mapun secara keseluruhannya.

Dengan demikian adanya data mengenai bentuk-bentuk partisipasinya masyarakat dalam pembangunan tersebut, belum dapat diketahui bagaimana perencanaan pembangunan. Namun demikian untuk mengetahui lebih jelas tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat seperti digambarkan pada tabel berikut ini:

TABEL 3

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN
KASSI-KASSI

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	6	16,66
2.	Baik	10	27,77
3.	Cukup Baik	18	50
4.	Tidak Baik	2	5,55
	Jumlah	36	100,00

Sumber Data: Hasil Pengolahan Kuesioner, tahun 2001.

..

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Kassi-Kassi Perwakilan Rappocini Pemerintahan Kota Makassar adalah cukup baik. Hal ini terlihat dengan adanya masing-masing responden memberikan penilaiannya sangat baik terhadap perencanaan pembangunan di Kelurahan yakni 6 orang responden atau 16,66%, selanjutnya yang mengatakan 10 orang responden atau 27,77%, yang mengatakan cukup baik yakni 18 orang responden atau 50%, dan yang mengatakan tidak baik yakni 2 orang responden atau 5,55 %.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan penting dewasa ini. Sebab meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka akan meningkatkan pula kegiatan pelaksanaan pembangunan, selaras dengan meningkatnya kegiatan usaha pembangunan yang antara lain diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya pembagian beban dan hasil pembangunan yang lebih merata dari kelompok masyarakat.

Sudah menjadi kenyataan bahwa keberhasilan seorang Kepala Kelurahan di mana ia mampu berperan sebagai penggerak dalam usaha-usaha pembangunan di samping itu tidak kalah pentingnya adalah dukungan yang

diberikan oleh masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan suatu kekuatan yang sangat berarti dan diperlukan dalam memperlancar laju pembangunan sekaligus mencerminkan dan membawa partisipasi masyarakat dan jiwa demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, partisipasi berdasarkan keinginan dan inisiatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan berarti masyarakat sudah mempunyai rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan, maka dengan sendirinya dia akan menjaga dan mengawasinya.

Berdasarkan dengan uraian tersebut maka sesuai dengan tanggapan masyarakat atau responden tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didasarkan atas keinginan dan inisiatif sendiri, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

generasi ke generasi sehingga pembangunan di segala bidang benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah yang berkelanjutan dan terus menerus maka partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam tugas ini.

Dari uraian diberikan oleh masyarakat di atas yakni masyarakat Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat dimengerti bahwa masyarakat Kelurahan Kassi-kassi telah menyadari bahwa pembangunan itu adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri, sebab tanpa ada kesadaran dan tanggung jawab serta kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan maka dengan sendirinya pelaksanaan pembangunan yang dicita-citakan tidak akan berhasil dengan rencana program yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat berpartisipasi sangat penting peranannya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Dalam kaitannya dengan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) terutama dalam fungsi BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan khususnya di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar, yaitu dimana dalam prakteknya disamping terdapat faktor pendukung juga sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam kenyataannya bahwa terdapat pula faktor penghambat.

1. Faktor Pendukung

Peningkatan pembangunan di Kelurahan Kassi-Kassi menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dewasa ini, baik kemajuan pembangunan daerahnya itu sendiri maupun kemajuan pembangunan masyarakatnya. Namun peningkatan dan keberhasilan pembangunan tersebut tidak terlepas dari berfungsinya organisasi Badan Perwakilan (BPD) sebagaimana mestinya. Demikian bahwa berfungsinya Badan Perwakilan Desa terutama berfungsi dalam mewadahi partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna

pelaksanaan pembangunan juga tidak terlepas dari faktor-faktor pendukungnya.

Dari data yang diperoleh penulis baik dari data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden maupun data yang diperoleh melalui kuesioner, bahwa faktor-faktor pendukung dalam mengfungsikan Badan Perwakilan Desa terutama fungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan adalah:

- a). Adanya koordinasi antara pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD dengan aparat Desa/Kelurahan.

Berfungsinya Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Kassi-Kassi adalah tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pengurus Badan Perwakilan Desa itu sendiri dengan aparat Kelurahan Kassi-Kassi.

Pada dasarnya usaha koordinasi tersebut dilakukan menurut Kepala Kelurahan Kassi-Kassi dari hasil wawancara penulis adalah untuk menghasilkan suatu hubungan atau komunikasi yang sedapat mungkin dapat mengarahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya melalui musyawarah, sehingga hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan pribadi

yang kurang menguntungkan bagi kepentingan kemajuan dapat dicegah.

Untuk mengetahui tanggapan responden berkenaan dengan koordinasi antara pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan aparat Kelurahan Kassi-Kassi berikut dikemukakan dalam bentuk tabel:

TABEL 5

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KOORDINASI ANTARA PENGURUS BPD DENGAN APARAT KELURAHAN KASSI-KASSI

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Baik	16	46,67
2.	Cukup Baik	20	53,33
3.	Kurang Baik	-	-
4.	Tidak Baik	-	-
	Jumlah	36	100,00

Sumber Data: Hasil Pengolahan Kuesioner, tahun 2001.

Melihat tabel di atas maka dapat dikemukakan bahwa koordinasi antara pengurus BPD dengan aparat Kelurahan Kassi-Kassi adalah baik, hal ini dari hasil kuesioner dimana yang memberikan tanggapan sangat baik ada 16 responden atau 46,67%, dan 53,33% atau sebanyak 20 orang responden menanggapi cukup baik, sedangkan yang menanggapi kurang dan tidak baik sama sekali tidak ada.

Jadi jelas bahwa dengan adanya koordinasi yang baik tersebut akan mendukung berfungsinya Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan.

b). Pengelolaan Administrasi BPD yang baik

Berhasilnya suatu desa/kelurahan dalam melaksanakan program-program pembangunan maupun dalam meningkatkan kemajuan masyarakatnya, tidak hanya dinilai dari satu sisi saja misalnya pembangunan fisiknya semata, akan tetapi berhasilnya program pembangunan di desa/kelurahan Kassi-Kassi tak terkecuali di Kelurahan Kassi-kassi adalah salah satunya disebabkan oleh pengelolaan administrasi yang baik.

Dengan adanya pengelolaan administrasi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang baik dan terpadu tersebut di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini adalah merupakan rangsangan dan dorongan serta motivasi bagi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan, baik pada saat masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan, baik pada saat perencanaannya maupun pada saat pelaksanaannya.

Untuk membuktikan secara jelas akan kebenaran pengelolaan administrasi BPD tersebut, maka penulis

menuangkan tanggapan responden, sebagai berikut:

TABEL 6

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI
BPD KELURAHAN KASSI-KASSI

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	15	33,33
2.	Cukup Baik	17	56,67
3.	Kurang Baik	4	10,00
4.	Tidak Baik	-	-
	Jumlah	36	100,00

Sumber Data: Hasil Pengolahan Kuesioner, tahun 2001.

Jadi jelaslah bahwa pengelolaan administrasi BPD di kelurahan Kassi-kassi adalah baik khususnya dalam rangka pengelolaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, hal ini terlihat dari tanggapan responden yang mana pada umumnya menanggapi sangat dan cukup baik atau sekitar 90,00% dari keseluruhan responden yang ada, meskipun ada 4 orang responden yang menanggapi kurang baik, sedangkan yang menanggapi tidak baik sama sekali tidak ada.

c). Besarnya tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam berpartisipasi.

Menjadi hal yang cukup penting dari kesadaran masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kelurahan Kassi-Kassi. Kesemuanya ini tercapai adalah tidak terlepas dari upaya-upaya maksimal dari aparat pemerintah desa khususnya oleh pengelola Badan Perwakilan Desa (BPD) Kelurahan Kassi-Kassi dalam hal mendorong semangat partisipasi masyarakat.

Menurut beberapa tokoh masyarakat yang sempat penulis wawancarai yang kesemuanya mengatakan bahwa tingginya kesadaran masyarakat pada umumnya di Kelurahan Kassi-kassi dalam ikut serta berpartisipasi khususnya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah hal yang cukup wajar, sebab dalam kenyataannya yang terjadi dimana pengurus BPD dalam membuat suatu program pembangunan dilakukan dengan upaya musyawarah dengan melibatkan langsung masyarakat dalam hal penentuan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan pula dalam bentuk tabel berkenaan dengan tanggapan responden tentang tingkat kesadaran masyarakat kelurahan Kassi-Kassi dalam ikut serta berpartisipasi dalam

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan, sebagai berikut:

TABEL 7

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT KELURAHAN KASSI-KASSI DALAM IKUT SERTA BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat tinggi	12	33,33
2.	Cukup tinggi	20	66,66
3.	Kurang tinggi	4	11,12
4.	Tidak tinggi	-	-
	Jumlah	36	100,00

Sumber Data: Hasil Pengolahan Kuesioner, tahun 2001.

Berdasarkan tabel di atas maka jelaslah bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Kassi-Kassi dalam rangka ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan adalah cenderung cukup tinggi yaitu sekitar 20 orang (66,66%), sedangkan yang memberikan tanggapan sangat tinggi 12 orang (33,33%) sedangkan yang mengatakan kurang tinggi 4 orang (11,12%) dan yang mengatakan tidak tinggi tidak ada.

2. Faktor Penghambat

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam kenyataannya bahwa disamping ada faktor pendukung dalam mengfungsikan Badan Perwakilan Desa (BPD) terutama dalam mengfungsikan BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan khususnya dalam prakteknya di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Kota Makassar, juga ditemui adanya faktor penghambat.

Dari hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian, ternyata yang menjadi faktor penghambat yang dianggap paling berpengaruh adalah keengganan warga masyarakat ikut rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan terutama dalam membahas atau memusyawarahkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Hal ini dibenarkan oleh beberapa responden yang sempat penulis wawancarai terutama oleh pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD) hal mana mengemukakan bahwa bilamana mengundang atau memanggil warga masyarakat dalam mengadakan rapat atau pertemuan guna membicarakan tahap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan terkadang tidak menghadiri undangan tersebut, bahkan ada acuh tak acuh.

Dengan keadaan yang demikian, menurut hemat penulis adalah hal atau sesuatu yang sangat sulit, oleh karena pada saat pemerintah aparat kelurahan dan pengurus BPD membutuhkan masukan atau input dalam hal perencanaan pembangunan dari masyarakat, namun pada saat itu pula terkadang tidak ada yang hadir.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan kelurahan karena masyarakat telah diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Perwakilan Rappocini Pemerintah Kota Makassar.
2. Fungsi badan perwakilan desa (BPD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kelurahan Kassi-Kassi adalah pada dasarnya sesuai dengan harapan, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta ikut aktif dalam menyumbangkan ide, gagasan dan proses pengambilan keputusan
3. Faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi badan perwakilan desa sebagai wadah partisipasi

masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di kelurahan Kassi-Kassi adalah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendukung dengan antara lain adanya faktor koordinasi yang baik antara pengurus badan perwakilan desa dengan aparat Kelurahan, pengelola administrasi badan perwakilan desa yang baik, dan besarnya tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sedangkan faktor penghambat yaitu faktor keengganan warga masyarakat untuk ikut rapat dan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh badan perwakilan desa khususnya di Kelurahan Kassi-Kassi.

B. Saran-Saran

1. Fungsi badan perwakilan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan dapat lebih berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka disarankan agar hendaknya pihak pengambil kebijakan berusaha melakukan alternatif-alternatif lain seperti melalui pendekatan per-

suasif kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh besar.

2. Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka disarankan kepada pemerintah kelurahan untuk selalu memberi motivasi kepada masyarakatnya guna yang lebih baik meningkatkan partisipasinya baik dalam bentuk tenaga, pemikiran, maupun partisipasi masyarakat berupa uang dan dahan dalam setiap kegiatan pembangunan.
3. Disarankan agar adanya faktor penghambat dalam mengungsikan badan perwakilan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, maka perlu dilakukan pendekatan-pendekatan persuasif sehingga masyarakat ikut serta berpartisipasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh badan perwakilan desa (BPD).

5. Bapak Drs. Marten D.Palobo', selaku Dosen Pembimbing II skripsi ini, sekaligus penasehat akademik.
6. Bapak Kepala Kelurahan Kassi-Kassi yang telah memberi isin dan membantu penulis secara mengadakan penelitian.
7. Bapak Dosen/Ibu Dosen dan staf karyawan Fisipol yang telah membina, mendidik dan mengarahkan sampai selesai.
8. Rekan-rekan Mahasiswa yang telah membantu selama dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, olehnya segala kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca akan penulis terima dengan senang hati dan lapang dada demi kesempurnaan skripsi ini. Amin.

Makassar, Mei 2001

Penulis

R I D H A

DAFTAR PUSTAKA

- Bertha, I Nyoman, 1992, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kuswara, Agustoha, 1995, *Manajemen Pembangunan Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mubyarto, 1983, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 1985, *Strategi Pembangunan Pedesaan*, P3PPK UGM, Yogyakarta.
- Ndraha, Talizuduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Bina Aksara, Jakarta.
- Pemudji S, 1993. *Ekologi Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Philip H. Sombs & Manzoot Ahmed, 1985. *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-Formal*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Prayitno, hadi dan Lincoln Arsyad, 1987, *Petani Desa dan Kemiskinan*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Siagian, S.P. 1983, *Administrasi Pembangunan*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- _____, 1992, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Penerbit CV. Haji Masagung, Jakarta.
- _____, 1994, *Filsafat Administrasi*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Soeparno, R, 1987. *Mengenal Desa dan Pengelolaannya Inter-masa*, Jakarta.
- Surjadi, A. 1989, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Mandar Maju Bandung.
- Suwihnjjo, 1985, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widjaja, A.W, 1993, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*, PT. Raja Ghrafindo Persada, Jakarta.

